



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA  
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)**

**TRIWULAN II**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PALANGKA RAYA, JULI 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Terselenggaranya *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pra syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk hal ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna memenuhi hal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2024 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan.

Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2024 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta kepada masyarakat/publik.

Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2024. dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah ini kami ucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palangka Raya, Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**Dr. H.M. KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19661022 199308 1 001**

## **BAB I**

### **KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada masukan, keluaran, dan hasil.

Dari pengukuran kinerja akan dapat dilakukan penilaian proses penyusunan Kebijakan/ Program/Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Adapun Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Triwulan I Tahun 2024.**

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui capaian kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Rumus yang digunakan dalam menghitung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**1) Sasaran Strategis pertama : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Politik.**

Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah (Nilai/Angka). Pencapaiannya diketahui setelah ada penilaian pada tahun berikutnya. Upaya pencapaian IKU tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik.

Dalam rangka mengukur, evaluasi, monitoring indeks demokrasi Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Maret 2024 yang diikuti oleh peserta yang berasal dari TNI, Polri, Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Pengurus Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Akademisi, Insan Pers, serta jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi secara langsung, konfirmasi berita/dokumen dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa, menggali informasi sehingga diperoleh data atau informasi yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan untuk data penilaian IDI di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Peserta FGD diberikan penjelasan umum mengenai bagaimana proses penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian hasil review surat kabar dan dokumen yang telah dilakukan oleh tim enumerator dari BPS, untuk kemudian diinput koreksi maupun tambahan informasi/data dari seluruh peserta. Sehingga dengan demikian data yang dihasilkan diharapkan sudah dievaluasi dan dikonfirmasi kepada seluruh peserta FGD.

Pencapaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia, berdasarkan data dari *Website* Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDI Kalimantan Tengah Tahun 2023 sebesar 77,57. Nilai ini turun 1,73 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,30.

Dalam rangka untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, serta memastikan berjalannya aplikasi Sistem Informasi Suara Kalteng Berkah (SISUKAH), Minggu (11/2/2024) Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi di Aula Badan

Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat ini diikuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik se Kalimantan Tengah secara daring melalui *zoom meeting*, serta Pejabat Administrator, Pengawas, dan ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Kalteng.

Kesbangpol juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis kepada admin Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, dan sebagian dari tenaga admin tersebut sudah mendaftar di Posko Induk SISUKAH yang berada di Sekretariat Desk Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan akun dalam pengoperasian aplikasi SISUKAH. Hal ini dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan penginputan data-data dari pihak TPS maupun pihak Kecamatan yang nantinya bersiaga di desk Kabupaten/Kota serta desk Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar I.1

Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SISUKAH



**2) Sasaran strategis kedua : Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM yang terlibat dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif (Persen). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Pada Triwulan I Tahun 2024, bidang teknis terkait telah melaksanakan Kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024**, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (5/3/2024) yang diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan anggota Tim Terpadu Pengawasan Ormas Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah . Kegiatan ini sebagai implementasi dan konsistensi penerapan Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di daerah, dan diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan sinergisitas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota terhadap aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Daerah. kegiatan ini juga sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dan koordinasi dalam pengelolaan data Ormas, baik Pendaftaran dan Pelaporan Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di daerah, yang merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan Ormas.



Gambar I.2

Dokumentasi Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Pembinaan dan Pengawasan Ormas Tahun 2024



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (26/7/2024).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Katma F. Dirun dalam sambutannya menyampaikan arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan pemahaman mengenai demokrasi menyambut pilkada di Kalimantan Tengah. Dengan terbukanya aspirasi masyarakat akan menjadi cikal bakal proses demokrasi menjadi lebih matang dan dewasa. Ia berharap bahwa kegiatan rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalimantan Tengah dapat menjadi platform untuk memperkuat persatuan dan solidaritas antara masyarakat Dayak di

wilayah tersebut. Dalam rangka mewujudkan Kalimantan Tengah damai dan harmoni untuk menyukseskan Pilkada tahun 2024, kegiatan ini dapat memperkuat kerja sama antar komunitas, membangun kebersamaan, serta mengatasi potensi konflik atau perpecahan yang mungkin terjadi selama proses Pilkada.

Gambar I.3

Dokumentasi Kegiatan *Rakor Kegiatan Kemasyarakatan Kapakat Dayak Bersatu Kalteng*



### **3) Sasaran Strategis ketiga : Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa.**

Sasaran ini dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan (orang). IKU tersebut diterjemahkan pelaksanaannya melalui program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Selama Triwulan I Tahun 2024, bidang teknis terkait telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan, antara lain

- a) Kegiatan **Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024 di Ruangan Berkah Bersinar Abadi Best Western Hotel Palangka Raya. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024** dengan tema Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam Menumbuhkembangkan Generasi Yang Tangguh, Mandiri dan Berkarakter Pancasila yang diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan guru pengampu pendidikan Pancasila pada SMA dan SMK yang ada di Kota Palangka Raya. Tujuan sosialisasi ini adalah meningkatkan kesadaran segenap komponen bangsa untuk menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk keragaman; mengoptimalkan pembelajaran Wawasan Kebangsaan yang sejalan dengan proses reformasi dan tidak indoktrinasi; dan Meningkatkan keteladanan dari para pimpinan nasional.

Gambar I.3  
Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Tenaga Pendidik Tahun 2024



- b) Kegiatan **Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Tahun 2024** dengan tema **“Generasi Muda sebagai Agen Perubahan dalam Membangun dan Memperkuat Jati Diri Bangsa Indonesia melalui Nilai-Nilai Bela Negara”**. Kegiatan ini diikuti oleh 50 (lima puluh) orang peserta yang merupakan siswa/siswi SMA dan SMK di Kota Palangka Raya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun sikap dan perilaku serta karakter setiap warga negara Indonesia yang cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nantinya memiliki kemampuan awal Bela Negara Negara yang bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); meningkatkan pengetahuan, memiliki tekad, sikap dan perilaku serta tindakan bela negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai dasar bela negara, dan nilai dasar kewarganegaraan dalam rangka membentuk karakter bangsa yang ulet, tangguh, berwawasan kebangsaan dan memiliki kesadaran bela negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara; dan dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh warga negara mempunyai hak dan kewajiban pembelaan terhadap negara, sehingga perlu upaya peningkatan kesadaran bela negara.

Bela negara memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai visi Indonesia Maju 2045. Visi Indonesia Maju 2045 adalah cita-cita untuk menjadikan Indonesia

sebagai negara maju di berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Gambar I.4  
Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara  
Tahun 2024



#### **4) Sasaran Strategis keempat : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD.**

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Potensi Terjadinya Konflik Terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentasi Kasus yang telah Ditangani). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan

Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Pada tanggal 08 Mei 2024, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN-PE) Tahun 2020-2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 339/5267/SJ tanggal 29 September 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pencegahan ekstremisme sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat guna tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang diikuti oleh 100 orang peserta yang merupakan Ketua / Pengurus Organisasi / Yayasan / Lembaga Masyarakat Adat, Agama dan Kepemudaan se Kabupaten Kotawaringin Timur.

Gambar I.5

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2024



**5) Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Sasaran strategis ini dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (orang). Indikator kinerja ini dicapai melalui program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

## **BAB II**

### **PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

#### **A. Kendala dan Permasalahan**

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024, dari segi pencapaian kinerja yang akan dicapai, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai jadwal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Data tindak lanjut penanganan potensi konflik hingga Triwulan II Tahun 2024 dan data capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif masih dalam proses pendataan dan penyusunan,
- b. Untuk Kegiatan rutin kantor, realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Sedangkan, untuk kegiatan lainnya dijadwalkan setelah Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

#### **B. Tindak Lanjut Penyelesaian**



Untuk mengatasi kendala yang terjadi selama Triwulan II Tahun Anggaran 2024, saat ini tengah dilakukan penjadwalan ulang kegiatan yang pelaksanaannya tertunda.

### **BAB III**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari capaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikator telah dapat dilaporkan perkembangan capaiannya, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya sedang dalam tahap proses pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, untuk pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah masih diperlukan upaya lebih lanjut dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala agar target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun dapat tercapai.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pelaporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Tengah Triwulan II Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana berakuntabilitas sesuai amanat yang telah diemban dan menjadi sarana umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Lampiran : LAPORAN MONEV RENCANA AKSI TW II TAHUN  
2024

Nama PD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**a. Laporan Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Satuan	Capaian Triwulan II			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Politik	Skor IDI Aspek Hak-Hak Politik Provinsi Kalimantan Tengah	78,75	Nilai / Angka	78,75	77,57	98,50%	Skor IDI Tahun 2023 yang release di 2024
2	Meningkatnya Jumlah Ormas/LSM Yang Terlibat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Capaian pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP aktif	85	Persen	85	0	0	
3	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	Masyarakat yang mengerti tentang wawasan kebangsaan	200	orang	200	100	50%	
4	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Yang Paham Terhadap Pencegahan Konflik IPOLEKSOSBUD	Potensi terjadinya konflik terkait IPOLEKSOSBUD yang telah ditangani (Persentase kasus yang telah ditangani)	85	Persen	85	0	0	
5	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	200	orang	200	0	0	

## b. Laporan Keuangan Penunjang Kinerja

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			11.300.808.478	11.300.808.478	3.566.572.644	31,56	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			2.869.943.317	2.869.943.317	282.905.550	9,86	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.869.943.317	2.869.943.317	282.905.550	9,86	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70.000.000	70.000.000	48.999.000	70,00	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	360.000.000	360.000.000	4.780.400	1,33	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500.000.000	500.000.000	-	0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.000.000	150.000.000	10.740.000	7,16	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150.200.000	150.200.000	79.259.950	52,77	
			Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	141.070.031	141.070.031	71.673.200	50,81	
			Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.000.000	10.000.000	825.000	8,25	
			Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	100.000.000	100.000.000	-	0,00	
			Pelaksanaan tugas Paskibraka	1.028.673.286	1.028.673.286	-	0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	10.000.000	10.000.000	-	0,00	
			Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	100.000.000	100.000.000	-	0,00	
			Pembentukan Paskibraka	250.000.000	250.000.000	66.628.000	26,65	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			126.593.458.609	126.593.458.609	117.491.735.264	92,81	
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		126.593.458.609	126.593.458.609	117.491.735.264	92,81	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	273.906.000	273.906.000	63.470.000	23,17	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	170.000.000	170.000.000		0,00	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	574.658.500	574.658.500	32.600.600	5,67	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	124.974.894.109	124.974.894.109	117.269.981.944	93,83	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	600.000.000	600.000.000	125.682.720	20,95	
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			613.514.000	613.514.000	66.479.900	10,84	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		613.514.000	613.514.000	66.479.900	10,84	
			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	100.000.000		0,00	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	140.000.000	140.000.000	66.479.900	47,49	



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	100.000.000		0,00	
			Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	173.514.000	173.514.000		0,00	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100.000.000	100.000.000		0,00	
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			1.512.060.250	1.512.060.250	517.720.000	34,24	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		1.512.060.250	1.512.060.250	517.720.000	34,24	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	95.000.000	95.000.000		0,00	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	95.000.000	95.000.000		0,00	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.157.894.250	1.157.894.250	517.720.000	44,71	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	95.000.000	95.000.000		0,00	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	69.166.000	69.166.000		0,00	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial			1.991.546.100	1.991.546.100	181.694.400	9,12	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		1.991.546.100	1.991.546.100	181.694.400	9,12	
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100.000.000	100.000.000	25.120.000	25,12	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	117.762.000	117.762.000		0,00	
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	335.961.000	335.961.000	80.068.300	23,83	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)			Ket.
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	591.499.100	591.499.100	24.770.000	4,19	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	365.533.000	365.533.000	6.757.800	1,85	
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	480.791.000	480.791.000	44.978.300	9,36	